

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan
Muara Payang Kabupaten Lahat)

Pilia Angriani (1), Amaliatulwalidain (2), M. Qur'anul Kariem (3)

Universitas Indo Global Mandiri Palembang, 0811-7322-710

Email Korespondensi: piliaelmansyah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya anggota kelompok tani. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang di gunakan menggunakan Teori Munawar Noor dan Edi Suharto dengan indikator enabling, empowering, protecting, pertumbuhan ekonomi dan kultural dan politis. Hasil penelitian menunjuk bahwa upaya-upaya yang di lakukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kendala-kendala yang terjadi seperti a).kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok tani serta sarana prasarana yang belum terpenuhi, b).kurangnya perhatian dan komitmen yang kuat dari kepala desa dalam merencanakan program dan kebijakan untuk kelompok tani, c).penggunaan teknologi yang tergolong masih sangat sederhana akibat kurangnya penerapan teknologi pertanian dan d).minimnya realisasi anggaran dana desa yang di pergunakan untuk pemberdayaan kelompok tani. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwasanya pemerintah desa belum berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui kelompok tani di desa Muara Gelumpai. Banyaknya permasalahan mulai dari ketidakjelasan kegiatan setelah pembentukan kelompok tani serta tidak adanya program yang dibuat oleh kepala desa sendiri untuk pemberdayaan kelompok tani, mengakibatkan timbul permasalahan-permasalahan baru.

Kata Kunci : Pemerintah Desa,Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Ekonomi, Kelompok Tani

Abstract: This research aims to find out what efforts the village head has made to empower the community, especially members of farmer groups. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation techniques using a qualitative approach. The theory used uses Munawar Noor and Edi Suharto's theory with indicators of enabling, empowering, protecting, economic, cultural and political growth. The research results show that the efforts made by the village government, in this case the village head, are still not optimal. This can be seen from the obstacles that occur, such as a). lack of socialization and guidance for farmer groups and inadequate infrastructure, b). lack of attention and strong commitment from village heads in planning programs and policies for farmer groups, c). The use of technology is still relatively simple due to the lack of application of agricultural technology and d). the lack of realization of the village fund budget which is used to empower farmer groups. From the results of this research, it can be concluded overall that the village government has not been successful in implementing community empowerment in economic development through farmer groups in Muara Gelumpai village. There are many problems ranging from unclear activities after the formation of farmer groups and the absence of programs created by the village heads themselves to empower farmer groups, resulting in new problems emerging.

Keywords: Village Government, Community Empowerment, Economic Development, Farmer Groups



Article History :

Received; 10-08-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 28-10-2023

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menyiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan untuk keadilan sosial yang berkelanjutan. Maka sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat khususnya petani untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial dalam sebuah kelompok masyarakat petani ini lah yang menghasilkan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat. Karena besarnya potensi pada sektor pertanian tentu sangat diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian di harapkan masyarakat bisa mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian (Sudarmanto, Eko dkk, 2020).

Pertanian sangat berperan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, baik melalui fisik mau pun sumber daya lain yang dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat. Sektor pertanian yang merupakan salah satu sumber kehidupan rata-rata penduduk terutama di desa yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar negara Indonesia di bandingkan dengan sektor lainnya, di buktikan dengan tingginya jumlah tenaga kerja pada Februari 2022 yaitu mencapai 40,6 juta orang yang merupakan angka terbesar dari total 17 sektor penyerap tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kecamatan Muara Payang merupakan adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor. 25 Tahun 2008. Setelah terbentuk, Kecamatan Muara Payang memiliki 7 desa dan beberapa dusun, salah satunya Desa Muara Gelumpai. Karena sebagian besar penduduk desa Muara Gelumpai adalah petani, maka sektor pertanian menjadi hal yang penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada hasil pertanian untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, terutama produksi pertanian kopi setahun sekali.

Namun hasil pertanian Desa Muara Gelumpai masih jauh dari harapan. Tentu saja di akibatkan beberapa hal seperti faktor cuaca, pengetahuan dan pemahaman, proses pemasaran, fasilitas dan lainnya. Selain itu kelompok tani juga sangat minim pembinaan dalam pengembangan usaha. Tentunya pengolahan pasca panen kopi sangat diperlukan dalam menentukan kualitas dan cita rasa kopi. Akibatnya, petani belum mampu mendapatkan hasil panen yang memadai. Pemerintah desa dalam hal ini berperan dalam memberikan ide-ide baru untuk menerapkan pemberdayaan petani agar dapat menghasilkan hasil yang meningkat dan kualitas terbaik, diantaranya melalui pembentukan “Kelompok Tani Serasan”. Kelompok Tani tersebut adalah sekumpulan warga yang memiliki pekerjaan yang sama sebagai petani kopi, terdiri atas bapak-bapak/lelaki yang beranggotakan 10-25 orang. Pembentukan kelompok tani oleh pemerintah desa tersebut sebagai wadah untuk mendapat dan mengembangkan pengetahuan dibidang pertanian. Akan tetapi permasalahannya dari awal terbentuknya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani ini, belum memberikan dampak dan kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan akibat dari berbagai faktor (Pemerintahan Desa Muara Gelumpai, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, 2022)..

Dalam hal pemberdayaan masyarakat pemerintah setempat yakni kepala desa berperan penting menjadi aktor utama dalam upaya penyedia akses pemberdayaan masyarakat terutama pada sektor pertanian di desa Muara Gelumpai. Dalam hal ini berdasarkan konsep otonomi desa proses pelaksanaan pemeritah desa diselenggarakan sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI. Maka dalam proses pelaksanaannya kepala desa harus memiliki program dan kebijakan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi sampai saat ini yang menjadi permasalahan di desa Muara Gelumpai adalah mengenai pelaksanaan secara langsung terkait dengan pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama pada sektor pertanian. Dimana belum adanya kejelasan alokasi dana untuk kebutuhan pemberdayaan tersebut. Dengan adanya dana desa yang seharusnya menjadi modal untuk terlaksananya kegiatan pemberdayaan, tentu akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan ekonomi melalui kelompok tani.

Maka dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)”, agar peneliti dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan kelompok tani dalam meningkatkan perekonomian pada sektor pertanian melalui pemberdayaan masyarakat khususnya para petani kopi. Karena sektor pertanian adalah bidang yang berperan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama masyarakat desa. Pembentukan kelompok tani dapat menjadi sebuah usaha pembangunan pertanian yang akan mengelola hasil pertanian dan menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama antar para petani dalam kelompok tani (Raintung, 2021).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui upaya yang di lakukan pemerintah desa tersebut, terdapat aspek kajian pemberdayaan masyarakat menurut (Noor, 2011) yaitu diantaranya :

1. *Enabling*, meningkatkan potensi masyarakat agar mampu bersaing secara sehat, mandiri dan berkembang.
2. *Empowering*, menyiapkan sarana prasarana melalui penyuluhan dan pelatihan agar masyarakat dapat mengembangkan dan mengelola potensi yang ada sebagai peluang usaha yang mendapat penghasilan.
3. *Protecting*, melakukan perlindungan lebih pada masyarakat yang tergolong masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan regulasi yang mampu melindungi dari adanya persaingan yang tidak seimbang.

Dalam konsep kajian tersebut, maka yang menjadi dasar upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan program dan kebijakan yang di buat sesuai dengan kebutuhan para anggota kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Konsep tersebut juga berhubungan dengan yang di sampaikan menurut Edi Suharto indikator penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ada 2 yaitu 1) kemampuan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) mampu dalam kultural dan politis. Maka dalam hal ini kedua pernyataan tersebut dapat di jadikan pondasi sebagai upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif. Kaelan menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih berfokus mengkaji kualitas objek penelitian untuk mendeskripsikan keadaan sebuah objek atau gejala tertentu. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek yang alami, yang mana peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif, serta hasil yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mempelajari tentang objek yang diteliti serta menganalisa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, maka peneliti akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari lokasi objek penelitian yaitu kelompok tani kopi di Desa Muara Gelumpai dan pemerintahan setempat (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala desa berperan sebagai peran utama penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Muara Gelumpai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan kepala desa, sejauh mana kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan tingkat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan. Permasalahan yang terjadi di desa Muara Gelumpai akan tetap ada apabila pemerintah tidak terlalu memperhatikan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu pun seperti permasalahan yang terjadi pada kelompok tani di desa Muara Gelumpai, apabila kepala desa tidak membentuk program ataupun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sektor pertanian. Maka dari itu untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, peneliti meneliti mengenai program atau pun kebijakan apa saja yang di buat untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian dengan anggaran dana desa yang ada. Dan apakah telah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi para petani atau belum.

Dengan menggunakan konsep aspek kajian dan indikator penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini di lakukan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi sektor pertanian di desa Muara Gelumpai. Dengan beberapa langkah yang di lakukan untuk proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data lapangan secara langsung dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan terkait.

Enabling

Membentuk Kelompok Tani

Perberdayaan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mengembangkan kemampuan untuk melakukan perubahan lingkungannya, aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan potensi pekerjaan, aktivitas sosial dan lainnya. Menurut Munawar Noor *enabling* adalah aspek yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya dalam meningkatkan potensi masyarakat agar mampu bersaing secara sehat, mandiri dan berkembang. Dikembangkan juga oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato dalam bukunya, bahwasanya *enabling* sebagai cara untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat agar berkembang. desa Muara Gelumpai yang



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menjadi lokasi penelitian ini memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian yakni produksi komoditas kopi. Masyarakat di desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani kopi. Desa Muara Gelumpai salah satu desa yang terletak di kabupaten Lahat dimana kabupaten Lahat merupakan salah satu penyumbang produksi kopi terbesar di Sumatera Selatan (innalar.com).

Dalam hal ini pemerintah setempat melakukan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi kopi dengan membentuk kelompok tani “Bersama Kita Bisa”. Maka dari pembentuk kelompok tani tersebut agar melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan membantu mengembangkan potensi pertanian kopi yang menjadi mata pencaharian penunjang perekonomian di desa Muara Gelumpai. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 Tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pendayagunaan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan dibentuknya kelompok tani, maka para petani berhak untuk mengikuti dan memanfaatkan setiap kegiatan yang di adakan guna memberdayakan masyarakat pada sektor pertanian.

Dari indikator ini menunjukkan bahwasanya untuk memberdayakan masyarakat di desa Muara Gelumpai, kepala desa setempat memilih untuk mengembangkan sektor pertanian dengan produksi kopi yang menjadi potensi utama di desa tersebut. Kepala desa membentuk kelompok tani sebagai upaya untuk mengembangkan potensi kopi. Maka sesuai dengan konsep *enabling* yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat agar berkembang. Dalam hal ini dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat sudah ada. Serta sangat diharapkan dalam pelaksanaannya kegiatan yang ada mampu menjadikan kelompok tani berjalan dengan efektif.

Empowering

a. Upaya Kepala Desa Dalam Mendukung Kelompok Tani

Aspek kedua yang dapat digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yakni dalam pembangunan ekonomi kelompok tani adalah melalui aspek *empowering*. *Empowering* adalah penyiapan sarana prasarana melalui penyuluhan dan pelatihan agar dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan potensi usaha yang memberikan penghasilan. Pengertian tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dijelaskan dalam buku Mardikanto dan Soebiato yang mengatakan bahwa *empowering* adalah usaha memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini kepala desa sebagai peran penting yang berupaya untuk mendukung dan membantu menyediakan sarana prasarana untuk pemberdayaan masyarakat. Diketahui dalam pelaksanaannya banyak sekali faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana menjadi salah satu faktor tersebut. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal memenuhi masukan-masukan masyarakat.

Agar pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana, perlu adanya tahapan-tahapan yang terkait dengan aspek-aspek keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat yang mampu memecahkan persoalan yang ada terkhusus pada pertanian. Beberapa diantaranya adalah melalui sosialisasi, pelatihan skill, produksi dan pemasaran (Amaliatulwalidain, Nike Angraini, 2019).

Dalam upaya mewujudkan konsep *empowering*, kepala desa mendukung dan mendorong para petani yang tergabung dalam kelompok tani “Bersama Kita Bisa” di desa Muara Gelumpai agar dapat menerima serta merasakan sarana prasarana yang disediakan. Kepala desa sudah memberikan arahan kepada kelompok tani untuk memasukan proposal-proposal permohonan bantuan kepada dinas terkait. Dengan adanya kegiatan tersebut menandakan bahwa kepala desa sudah berupaya mendukung berkembang kelompok tani melalui arahan untuk mengajukan bantuan guna untuk pemenuhan kebutuhan pertanian kopi. Namun pengarahan kepada kelompok tani untuk membuat proposal pengajuan bantuan kepada Dinas Pertanian faktanya belum ada tindak lanjut dari hal tersebut. Dalam rangka pelaksanaan konsep *empowering* yaitu penyiapan sarana prasarana melalui penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani, dapat disimpulkan belum berjalan karena minimnya penyuluhan terkait program-program pertanian yang berkelanjutan.

b. Program Kartu Tani

Kesejahteraan adalah sebuah tatanan kehidupan sosial yang berada pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri. Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi masyarakat tergolong tingkat kesejahteraan yang masih rendah atau miskin.



Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya mengenai kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, agar mewujudkan tujuan pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi para masyarakat dengan ekonomi kurang mampu (jdih.kemenkeu.go.id).

Desa Muara Gelumpai yang mayoritas masyarakat merupakan petani kopi sangat memerlukan adanya pemberdayaan dengan kebijakan dan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses produksi pun sangat diperlukan pengetahuan dan bantuan dari pemerintah. Inovasi dan kebijakan dalam hal ini merupakan upaya nyata berkelanjutan yang harus diterapkan pelaksanaannya dilapangan dengan konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani. Dengan adanya kelompok tani “Bersama Kita Bisa” tentunya dapat menjadi penguat untuk mewujudkan kesejahteraan para petani (setneg.go.id).

Untuk pemenuhan fasilitas sarana prasarana, bantuan, pelatihan dan penyuluhan untuk kelompok tani belum berjalan dengan efektif. Dengan alat-alat pertanian sederhana dan pengetahuan yang dimiliki oleh para petani belum mampu mengembangkan produksi kopi dengan maksimal. Dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan inovasi-inovasi yang mampu mewujudkan kesejahteraan para petani. Tentunya kepala desa sangat berperan penting untuk menyiapkan sarana prasarana serta penyuluhan dan pelatihan agar para petani mampu mengembangkan dan mengelola potensi tanaman kopi sebagai usaha para warga desa.

Namun dalam ketidak efektifan kelembagaan kelompok tani tersebut, para anggota kelompok tani mengatakan jika belum lama ini tepatnya pada tanggal 1 Januari 2023 pemerintah memberikan sarana pertanian melalui program berupa “Kartu Tani” yang berbentuk ATM dan memiliki fungsi sebagai alokasi pupuk subsidi. Kartu tersebut adalah program dari Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan server BRI yang di berikan kepada para anggota kelompok tani sebagai alat untuk pembelian pupuk dengan potongan harga. Para petani diharuskan mengisi saldo pada ATM tersebut terlebih dahulu lalu dapat menggunakannya di tempat tertentu untuk membeli pupuk. Dengan membawa KTP dan KK para petani yang terdaftar dalam anggota kelompok tani mendatangi Dinas Pertanian setempat untuk menerima kartu tani tersebut.

Dari analisa pernyataan-pernyataan yang di teliti, hasilnya menunjukkan bahwasanya dalam rangka pemenuhan kesejahteraan kelompok tani pemerintah melalui program kartu tani yang di inisiasi oleh Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan server BRI belum dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan para anggota kelompok tani. Dikarenakan dengan adanya kartu tani belum bisa memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh petani. Tidak adanya penyuluhan berkelanjutan mengakibatkan petani tidak mampu mengaksesnya.

Dana Desa Muara Gelumpai Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PENDAPATAN	PENGELUARAN
1.Pendapatan asli desa	Rp. 1.500.000,00	
2.Dana desa	Rp. 898.910.000,00	
3.Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 9.758.200,00	
4.Alokasi dana desa (ADD)	Rp. 470.683.440,00	
5.Jumlah Pendapatan	Rp.1.380.851.640,00	
Belanja		
1.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		Rp. 422.598.057,00
2.Bidang pelaksanaan pembangunan desa		Rp. 624.611.750,00
3.Bidang pembinaan kemasyarakatan		Rp. 97.324.000,00
4.Bidang pemberdayaan masyarakat		Rp. 55.700.000,00
5.Jumlah belanja		Rp. 1.200.233.807,00
Jumlah	Rp.1.380.851.640,00	Rp. 1.200.233.807,00

Sumber : Dokumen Dana Desa diakses pada Selasa, 27 Juni 2022

Berdasarkan tujuan disalurkannya dana desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa tujuan alokasi dana desa adalah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, BPD dan operasional penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana ekonomi desa salah satunya pemberdayaan dibidang ekonomi masyarakat dan kelompok usaha yang merupakan potensi masyarakat desa (djp.kemenkeu.go.id).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Hal tersebut juga berkesinambungan dengan pernyataan Presiden RI pada tahun 2019 lalu. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada agenda sosialisasi penggunaan dana desa di Jawa Timur pada 4 Januari tahun 2019, beliau menjelaskan bahwa dana desa naik menjadi Rp.73 triliun yang mana ditahun sebelumnya berjumlah Rp.60 triliun. Presiden menyatakan jika ia ingin anggaran dana desa terus naik setiap tahunnya. Dalam sosialisasinya presiden menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya dana desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Maka sejak pada tahun 2019 tersebut presiden menginginkan dana desa mulai lebih menekankan untuk anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inovasi-inovasi (setneg.go.id).

Akan tetapi pada realita pelaksanaannya kepala desa belum memiliki program atau kebijakan yang dibuat sendiri untuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Alokasi dana desa tidak jelas arahnya kemana. Tidak adanya transparansi dana desa dan adanya proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan warga yang selalu di adakan tiap tahunnya. Sedangkan upaya-upaya lain seperti sarana prasarana pertanian belum terencana dengan optimal. Akibat masalah tersebut tentunya mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat kepada kepala desa.

Dengan anggaran dana desa Muara Gelumpai berjumlah Rp.898.910.000 seperti pada tabel 5.2.2 seharusnya kepala desa mampu membuat program atau inovasi sendiri yang berupaya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya untuk kelompok tani. Jika dilihat dari tabel dana desa tersebut kepala desa masih mengalokasikan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa lebih besar (memprioritaskan) dari pada untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kepala desa belum sepenuhnya mampu mengatur dana desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan yang sudah ada.

Protecting **Pengukuhan dan Pembinaan Kelompok Tani**

Selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para petani yaitu anggota kelompok tani sebagai objek penelitian ini, tentunya sangat diperlukan adanya regulasi. Regulasi sendiri adalah sebuah aturan atau perlindungan yang dibuat untuk mengendalikan sebuah tatanan agar dipatuhi dalam pelaksanaannya sehingga setiap kegiatan menjadi lebih efektif.

Seperti yang dijelaskan menurut teori utama yang digunakan dalam penelitian ini bahwa aspek kajian pelaksanaan pemberdayaan yang ketiga adalah melalui konsep *protecting*. *Protecting* merupakan adanya perlindungan lebih pada masyarakat yang tergolong masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan melalui regulasi yang mampu melindungi dari adanya persaingan yang tidak seimbang.

Seperti kelompok tani pada umumnya, kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan kegiatan yang telah disusun terlebih dahulu untuk hal pengembangan komoditas agar menjadi lebih baik.

Akan tetapi walaupun sudah lama dibentuk, kelompok tani ini masih belum mencapai tujuan sebenarnya sehingga masih banyak terjadi masalah yang sama dan berulang. Maka dengan adanya regulasi yang jelas akan membantu kelompok tani untuk bersinergi meningkatkan intensitas dan kualitas karena merasa memiliki tanggung jawab dalam kelembagaan pertanian. Seperti pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Pasal 1, menyatakan bahwa kelembagaan petani dikembangkan dari, oleh dan untuk petani guna kepentingan bersama. Kelembagaan petani yang dimaksud salah satunya adalah kelompok tani. Untuk mengetahui apakah regulasi pengembangan kelompok tani di desa Muara Gelumpai sudah diatur secara jelas atau belum, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh dokumen piagam pengukuhan dan pembinaan kelompok tani.

Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani “Bersama Kita Bisa” sudah dibentuk dengan regulasi yang jelas dari segi keanggotaannya tidak terbentuk secara otomatis saja. Regulasi yang ada sudah mengatur secara jelas siapa saja yang mengemban tanggung jawab sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan keanggotaannya. Sesuai dengan prosedurnya kelompok tani merupakan organisasi sosial nonformal yang dibentuk atas dasar inisiatif pemerintah desa yang bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan para petani yang memiliki usaha yang sama yakni produksi kopi yang menjadikan kopi sebagai penunjang kehidupannya.

Oleh sebab itu para petani merasa memiliki kelompok tani karena terdapat bukti keanggotaannya dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian RI. Maka apabila terdapat kebijakan, bantuan, pelatihan dan penyuluhan serta informasi terkait kelompok tani mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam



menerimanya. Maka bisa dikatakan kepala desa sudah melakukan pemberdayaan dari segi regulasi keanggotaan yang jelas dalam kelompok tani.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Petani

1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pada Kelompok Tani

a. Infrastruktur Jalan Usaha Tani

Munawar Noor bahwa dikatakan pemberdayaan masyarakat apabila terjadi peningkatan potensi masyarakat, kesejahteraan masyarakat berupa terpenuhinya sarana prasarana yang dapat mengembangkan dan mengelola potensi menjadi peluang usaha yang menghasilkan serta adanya perlindungan terhadap masyarakat dari timbulnya persaingan tidak seimbang. Berdasarkan pernyataan sebelumnya peningkatan potensi masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat, maka melalui proses peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dapat menjadi indikator penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan akan dapat memberikan akses kemudahan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dan merupakan kegiatan yang berkesinambungan berkelanjutan dan bertahap menuju ketinggian yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan harus dilakukan bertahap di segala sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram serta berkelanjutan agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan untuk memperbaiki perekonomian warga masyarakat desa terutama para petani (Hasan dan Azis, 2018).

Secara umum indikator penentu peningkatan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari infrastruktur, fasilitas umum, akses informasi, kualitas SDM dan pendapatan penduduk. Maka dalam penelitian ini untuk melihat tingkat keberhasilan peningkatan pembangunan ekonomi dalam kelompok tani dapat dilihat dari beberapa indikator tersebut, diantaranya pembangunan infrastruktur dan hasil pendapatan.

Dengan mengalokasikan dana desa berkisar Rp.624.611.750 yang dirangkum dalam dana desa pada tabel 5.2.2 pelaksanaan pembangunan desa, jalan usaha tani menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang ada pada tahun 2021. Adanya pembangunan infrastruktur jalan tersebut, kepala desa menyampaikan bahwasanya sebagian dana desa digunakan untuk pembuatan jalan yang digunakan para petani sebagai akses menuju ke perkebunan kopi. Dengan adanya infrastruktur jalan tersebut memberikan kemudahan akses bagi para petani yang mana sebelumnya harus melalui jalanan yang cukup terjal berkelok dan berbahaya untuk menuju keperkebunan kopi menjadi lebih aman hingga bisa dilalui dengan mobil dan motor.

Dengan adanya kerja sama antara kepala desa, kelompok tani dan pihak dinas yang berwenang lainnya tentu akan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya harus dipersiapkan dengan perencanaan yang baik dan dengan dana yang mencukupi juga. Dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sangat diharapkan pemerintah mencanangkan inovasi baru yang nantinya akan memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi para petani. Misalnya dengan membantu mempromosikan komoditas kopi lokal melalui objek wisata kopi, maka komoditas kopi lokal di desa Muara Gelumpai akan lebih dikenal di pasaran.

b. Hasil Pendapatan

Selain pembangunan infrastruktur, tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi juga dapat dinilai dari hasil pendapatan. Hal tersebut dikarenakan jika hasil pendapatan komoditas mengalami peningkatan maka pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil dilaksanakan dengan efektif. Begitu pun sebaliknya jika tidak ada peningkatan hasil pendapatan komoditas maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif.

Kopi adalah komoditas pertanian di Indonesia yang memiliki peluang ekspor tertinggi. Kopi termasuk tanaman tahunan yang banyak diperdagangkan, maka sangat diperlukan perhatian lebih dalam membudidayakan tanaman kopi. Kopi bukan hanya secangkir minuman yang memiliki aroma khas dan mengandung kafein. Tetapi untuk menjadi secangkir kopi memerlukan proses yang sangat panjang mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen hingga penyajian akhir. Buah yang diolah dengan benar akan menghasilkan biji kopi dengan kualitas mutu tinggi. Kriteria kualitas kopi bisa ditentukan dari aspek fisik, cita rasa dan kebersihan tergantung dengan proses produksi kopi itu sendiri. Buah kopi yang memiliki kualitas baik adalah buah kopi yang dipetik dalam keadaan matang sempurna berwarna merah atau pun hijau tua. Dengan demikian hasil pengelolaan petani



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menjadi faktor penentu kualitas harga kopi. Pada sektor pertanian kopi sering kali dihadapkan oleh permasalahan yang ada yaitu rendahnya produktivitas kopi, harga jual kopi yang mengalami fluktuasi dan kenaikan harga produksi hal ini tentu saja mengakibatkan pendapatan petani rendah.

Akan tetapi dengan adanya akses jalan usaha tani tidak memberikan dampak peningkatan terhadap hasil pendapatan petani, melainkan hanya memberikan kemudahan kepada petani sebagai akses untuk menuju ke perkebunan kopi. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Muara Gelumpai guna meningkatkan pembangunan ekonomi para petani belum cukup efektif, karena belum memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan hasil pendapatan produksi kopi. Adanya program pembangunan tersebut juga tidak diiringi dengan program lain yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga menjadikan pembangunan akses jalan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat terhadap penghasilan petani.

2. Kegiatan Berbudaya Dan Politik

a. Budaya Gotong Royong

Budaya merupakan sebuah pola hidup secara menyeluruh yang diwariskan turun temurun. Budaya terbentuk karena beberapa unsur diantaranya adat istiadat, bahasa, karya seni, agama dan politik. Menurut Linton budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan kepada masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Pernyataan tersebut berkesinambungan juga dengan definisi budaya menurut Andreas Eppink yang mengatakan budaya mencakup keseluruhan mengenai norma dan nilai sosial, ilmu pengetahuan serta struktur sosial, religius dan lainnya.

Pada bidang pertanian tentu kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu kebudayaan yang masih terjadi pada bidang pertanian adalah budaya gotong royong yang mana setiap individu ataupun kelompok dapat melakukannya. Namun karena pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan budaya gotong royong yang sebelumnya saling tolong menolong menjadikan masyarakat bersifat individualisme masing-masing masyarakat. Yang seharusnya dengan adanya gotong royong dapat meningkatkan nilai kerja sama antar para petani, namun faktanya setiap individu mengharapkan upah agar dapat saling membantu dalam setiap kegiatan pertanian.

Kebudayaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh para anggota kelompok tani adalah budaya gotong royong. Akan tetapi akibat perkembangan zaman dengan pengaruh teknologi yang ada, mengakibatkan rasa untuk saling tolong menolong semakin berkurang dan budaya gotong royong pun lambat laun menjadi menghilang. Jika kepala desa tidak segera berupaya mengatasi permasalahan tersebut maka nilai yang tertanam pada kebudayaan akan hilang dan akan berpengaruh bagi generasi selanjutnya.

b. Politik Pembangunan Pertanian

Dalam pertanian politik adalah sebuah kebijakan yang dirancang untuk memberi kemudahan dan kelancaran terhadap laju pembangunan ekonomi pertanian. Pada politik pembangunan pertanian pemerintah berupaya melakukan tindakan untuk memajukan pertanian, menjadikan pertanian menjadi lebih produktif, tingkat hidup petani menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan menjadi merata.

Terkait dengan tujuan politik pembangunan tersebut, pemerintah harus memiliki strategi tertentu dalam meningkatkan pembangunan pertanian. Apa lagi pada era teknologi seperti sekarang ini. Bukan hanya mekanisme mesin dan alat pertanian saja yang harus berjalan dengan optimal melainkan integritas dengan jaringan internet juga harus optimal. Karena teknologi sangat berpengaruh terhadap segala aspek untuk saat ini.

Dinas Pertanian memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan kewenangan pemerintah pada bidang pertanian. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Lahat memiliki strategi-strategi dalam pengembangan pertanian sesuai dengan visi-misi. Selain itu Dinas Pertanian juga memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan, perumusan kebijakan pertanian hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian guna untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

Akan tetapi tidak semua kebijakan dapat dirasakan oleh semua petani, salah satunya pada anggota kelompok tani di Desa Muara Gelumpai. Meskipun Dinas Pertanian memiliki banyak strategi dalam pembangunan pertanian, kelompok tani "Bersama Kita Bisa" tidak menerima dampak kebijakan tersebut dengan optimal. Hal ini tentu saja dapat dinilai dari kegiatan-kegiatan pertanian yang jarang dilakukan pada desa Muara



Gelumpai. Akan tetapi sangat disayangkan belum terlaksana dengan optimal di desa Muara Gelumpai. Pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan kelompok tani yang seharusnya diberdayakan agar mampu meningkatkan pembangunan ekonomi pertanian. Penyuluhan dan pelatihan yang sangat diharapkan oleh para petani belum pernah dilaksanakan di desa tersebut. Untuk bantuan seperti alat dan mesin pertanian juga belum pernah ada. Dalam hal ini terkait dengan strategi kebijakan pembangunan pertanian guna memberdayakan petani melalui kelompok tani “Bersama Kita Bisa” belum berjalan dengan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat), dapat di tarik kesimpulan bahwa upaya-upaya yang di lakukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kendala-kendala yang terjadi seperti a).kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok tani serta sarana prasarana yang belum terpenuhi, b).kurangnya perhatian dan komitmen yang kuat dari kepala desa dalam merencanakan program dan kebijakan untuk kelompok tani, c).penggunaan teknologi yang tergolong masih sangat sederhana akibat kurangnya penerapan teknologi pertanian dan d).minimnya realisasi anggaran dana desa yang di pergunakan untuk pemberdayaan kelompok tani.

Meski pun ada beberapa upaya yang sudah di lakukan oleh kepala desa, akan tetapi upaya-upaya yang di lakukan belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan para anggota kelompok tani. Adapun upaya yang sudah di lakukan tersebut yaitu dengan membentuk kelompok tani untuk tujuan meningkatkan potensi desa, menjalankan program yang sudah ada dari Kementerian Pertanian RI, membentuk kelompok tani dengan regulasi yang jelas dan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.

Akan tetapi upaya yang di lakukan tersebut masih sangat kurang untuk menghasilkan perkembangan yang lebih baik. Sehingga dapat dikatakan pemerintah desa belum berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui kelompok tani di desa Muara Gelumpai. Banyaknya permasalahan mulai dari ketidakjelasan kegiatan setelah pembentukan kelompok tani serta tidak adanya program yang dibuat oleh kepala desa sendiri untuk pemberdayaan kelompok tani, mengakibatkan timbul permasalahan-permasalahan baru.

Salah satunya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa karena anggaran dana desa yang tidak jelas arahnya. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal tersebut tentunya akan berpotensi meningkatnya angka kemiskinan di Desa Muara Gelumpai karena tidak adanya pemberdayaan yang tepat. Padahal sektor pertanian terutama pertanian kopi adalah mata pencaharian utama penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat di desa tersebut. Jika tidak adanya perhatian yang serius dari kepala desa otomatis sektor pertanian tidak akan berkembang dan menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* : CV.Syakir Media Press, Makassar
- Amaliatulwalidain, Nike Angraini, B. H. (2019). Pembuatan Kue Tempe Matcha Di Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang ., *Abdimas Mandiri*, 3(2), 137–142.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PGM/article/view/829/978>
- Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto (2020). *Pemberdayaan Masyarakat* : Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67 Tahun 2016 Petani pasal 1 ayat 1 tentang Pembinaan Kelembagaan Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1, No.2(2), 1–9.
- Sudarmanto, Eko., dan Erika Revida, Nur Zaman Marulam MT Sirmarmata, Sukarman Purba, Syafrizal Erniarti Bachtiar, Annisa Ilmi Faried, Nasrullah, Ismail Marzuki Puji Hastuti, Jamaludin, Irwan Kurniawan Faizah Mastutie, Andi Susilawaty. (2020) *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat* : Pembangunan dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis.
- Sukino. (2013). *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*: Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 tentang desa
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 tentang desa

